

Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif *Good Public Policy Governance*

Akhyar^{a*}, Syarif^b

^aProgram Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia

^bProgram Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

*Co-Author Email: akhyar@universitasmbojobima.ac.id

Article Information

Submitted: 22

Desember 2023

Accepted: 24

Januari 2024

Online Publish: 24

Januari 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang inovasi kebijakan di sektor pariwisata Kabupaten Bima dengan memandangnya dari *perspektif Good Public Policy Governance*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bima dengan fokus pada partisipasi masyarakat, transparansi, pengelolaan lingkungan, dan kolaborasi sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata, dan perlu pengelolaan lingkungan yang lebih optimal. Namun, terdapat peluang inovasi, seperti peningkatan partisipasi melalui mekanisme partisipatif yang kuat, peningkatan transparansi melalui laporan publik, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemitraan dan kolaborasi diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk mencapai keberlanjutan tersebut. Kesimpulannya, Kabupaten Bima dapat mengoptimalkan inovasi kebijakan dengan memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, mengelola lingkungan secara berkelanjutan, dan membangun kemitraan yang kuat, sehingga menciptakan tata kelola pariwisata yang baik dan berdampak positif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: tantangan, inovasi, kebijakan, pariwisata

Abstract

This research aims to analyze the challenges and opportunities for policy innovation in the tourism sector of Bima Regency from the perspective of Good Public Policy Governance. Using a qualitative approach, the study was conducted at the Bima Regency Tourism Office, focusing on community participation, transparency, environmental management, and sector collaboration. The results indicate limited community participation, insufficient transparency in tourism fund management, and a need for more optimal environmental management. However, there are innovation opportunities, such as enhancing participation through robust participatory mechanisms, improving transparency through public reporting, and developing sustainable tourism. Partnership and collaboration were identified as key factors for achieving sustainability. In conclusion, Bima Regency can optimize policy innovation by strengthening community participation, enhancing transparency, managing the environment sustainably, and building strong partnerships, thereby creating effective governance for tourism with positive impacts. This research provides insights for policymakers to design more effective strategies in promoting sustainable and inclusive tourism development

Keywords: challenges, innovation, policy, tourism

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Akhyar, Syarif/Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: *Perspektif Good Public Policy Governance*/Vol 4 No 6 (2024)

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.324>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Dalam era dinamika dan kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan politik, prinsip *Good Public Policy Governance* menjadi landasan penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021); (Subhan, 2017). *Good Public Policy Governance* merujuk pada suatu kerangka kerja yang memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Alfianita et al., 2015); (Sururi, 2017). Penerapan *Good Public Policy Governance* di dalam suatu sistem pemerintahan menempatkan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Seiring dengan evolusi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pemahaman mendalam terhadap perspektif *Good Public Policy Governance* menjadi semakin penting (Ayunda, 2021). *Good Public Policy Governance* bukan hanya merupakan seperangkat pedoman praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun hubungan saling percaya antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Yustiari, 2016).

Demikian. di tengah dinamika pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bima, penerapan perspektif *Good Public Policy Governance* (GPPG) menjadi sangat relevan. Kabupaten Bima, sebagai sebuah entitas yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan, menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yustiari, 2016).

Penerapan GPPG di dalam kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bima dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip GPPG memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan memperhitungkan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan ruang partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait (Widanti, 2022).

Dalam konteks pertanian misalnya, penerapan GPPG dapat membantu memastikan distribusi sumber daya dan dukungan yang merata kepada petani lokal. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas program-program pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sedangkan pada aspek pemberdayaan, GPPG akan mendorong pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bima dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi dan kebijakan. Melalui partisipasi publik dan transparansi, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Demikian pada aspek Pariwisata. Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu daerah, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bima, sebagai destinasi pariwisata potensial di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam mengelola sektor pariwisata secara efektif. Dalam konteks ini, inovasi kebijakan menjadi kunci untuk menjawab kompleksitas dinamika pariwisata modern.

Tantangan-tantangan tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan budaya, hingga pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lokal (Imaduddin, 2017); (Di et al., 2023). Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan daya saing dan memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Bima juga sangat besar (Rochayati & Arifin, 2019) (Jasman & Arman, 2023).

Demikian, dari beberapa hasil penelitian terdahulu mendeskripsikan dan mengidentifikasi sejumlah masalah dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Bima, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Sururi, 2019) (Jumadi, 2020). Beberapa masalah tersebut mencakup kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata dapat menciptakan ketidakpastian

di antara pemangku kepentingan dan masyarakat berdampak kepercayaan publik terhadap kebijakan pariwisata dapat tergerus, dan alokasi dana mungkin tidak optimal (Rochayati & Arifin, 2019); (Jupir, 2013). Masalah selanjutnya ialah munculnya ketidakmerataan manfaat pariwisata, dimana Pariwisata sering kali memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata di antara masyarakat lokal (Imaduddin, 2017) ; (Mulyana et al., 2019). Dampaknya terjadi Disparitas ekonomi dapat meningkat, dan masyarakat di daerah tertentu mungkin tidak merasakan dampak positif dari industri pariwisata (Di et al., 2023) (Munir, 2022).

Kemudian hasil penelitian (Jasman & Arman, 2023) juga mendeksripsikan dan mengidentifikasi masalah dalam pengembangan sektor pariwisata, dimana keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan tersendiri akibat kurangnya perencanaan berkelanjutan dapat mengarah pada kerusakan lingkungan dan kehilangan daya tarik pariwisata (Ramdhon et al., 2020). Dampaknya terjadi penurunan kualitas lingkungan dapat mengurangi daya tarik destinasi pariwisata dan merugikan ekosistem lokal (Ahmad et al., 2018); (Sahli, 2021). Selain itu, juga partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata yang terbatas. Sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan pariwisata dapat menurun, mengakibatkan kurangnya dukungan dari masyarakat (Potensi et al., 2023) ; (Surwandono et al., 2020).

Kemudian dalam penelitian lainnya menjelaskan terkait kurang kurangnya koordinasi antar stakeholder (Herdiana, 2020); (Febrianti et al., 2023). Kurangnya koordinasi di antara instansi terkait dapat menghambat implementasi kebijakan pariwisata secara efektif (Ahmad et al., 2018) ; (Hilman, 2017). Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat menjadi lambat dan kurang terkoordinasi (Ayu Diyah Sri Widari Dewa, 2020). Selain itu tantangan pengembangan Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan raya, akomodasi, dan fasilitas pariwisata lainnya, dapat membatasi pertumbuhan industri pariwisata (Darmawan, 2020). Tantangan ini tentu berdampak pada pengalaman wisatawan dapat terpengaruh, dan daya tarik destinasi pariwisata dapat terhambat (Harirah et al., 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya inovatif dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Bima, dengan fokus pada perspektif *Good Public Policy Governance*. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi, diharapkan adanya pemikiran baru dalam pengembangan kebijakan pariwisata. Dengan mempertimbangkan prinsip *Good Public Policy Governance*, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Bima dapat mengoptimalkan potensi pariwisatanya secara berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola kebijakan pariwisata yang baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selain melakukan wawancara langsung, juga melakukan survei literatur akademis di bidang keilmuan administrasi publik dan kebijakan pariwisata. Selain itu, juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan inovasi kebijakan khususnya dalam pengembangan pariwisata. Data sekunder tersebut diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan proses analisis data berdasarkan teori dan konsep dan inovasi kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intepretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif "*Good Public Policy Governance*" dalam Pengelolaan Pariwisata melibatkan kerangka kerja yang transparan, adil, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan menciptakan dampak positif yang merata bagi masyarakat dan destinasi pariwisata. Pertama, partisipasi masyarakat menjadi landasan utama dalam perspektif ini. Dalam pembuatan kebijakan pariwisata, pemerintah lokal menggandeng masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup pendekatan inklusif untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan dapat mencerminkan nilai-nilai lokal, dan implementasinya dapat mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Kedua, perspektif ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menanggulangi potensi konflik. Proses pengambilan keputusan yang terbuka memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan menilai efektivitas kebijakan. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi prioritas, dengan fokus pada pelestarian lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. Dengan menjaga keseimbangan ini, perspektif *Good Public Policy Governance* dalam pengelolaan pariwisata bertujuan mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi semua pihak terlibat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima merupakan fondasi utama untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang responsif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Bima memandang partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mengakomodasi beragam perspektif, kebutuhan, dan aspirasi lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata. Melibatkan warga lokal dalam proses pengambilan keputusan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga memperhatikan keunikan dan kekayaan lokal.

Kedua, berbagai mekanisme partisipatif diterapkan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bima. Forum konsultasi publik, pertemuan terbuka, dan kelompok kerja bersama antara pemerintah lokal, komunitas, dan pelaku bisnis pariwisata digunakan untuk memfasilitasi dialog terbuka. Hal ini membantu mengidentifikasi prioritas bersama, membangun pemahaman yang lebih baik, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan.

Ketiga, melalui inisiatif partisipatif, masyarakat lokal di Kabupaten Bima diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi pariwisata mereka. Proses partisipatif bukan hanya sekadar konsultasi formal, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata, meningkatkan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya serta menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Namun meskipun partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima diintegrasikan ke dalam kerangka *Good Public Policy Governance* untuk pengelolaan pariwisata, terdapat sejumlah kegagalan yang perlu diatasi. Pertama, kegagalan partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang proses pengambilan keputusan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui partisipasi aktif. Beberapa komunitas

mungkin tidak sepenuhnya menyadari peran dan dampak mereka dalam pengembangan pariwisata lokal, yang dapat menghambat tingkat keterlibatan mereka.

Kedua, ketidaksetaraan dalam partisipasi masyarakat juga dapat menjadi faktor kegagalan. Beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok minoritas atau komunitas yang kurang mampu, mungkin mengalami kesulitan untuk menyuarakan pendapat mereka atau memiliki akses yang terbatas terhadap platform partisipasi. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perwakilan dan pengaruh masyarakat dalam pembuatan kebijakan pariwisata, yang bertentangan dengan prinsip *Good Public Policy Governance* yang menekankan pada keadilan dan keterlibatan semua pihak.

Upaya perbaikan yang diperlukan melibatkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat partisipasi mereka dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan transparansi dan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang proses kebijakan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, harus ada upaya khusus untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta partisipasi yang inklusif dan mendukung prinsip *Good Public Policy Governance*.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas membentuk dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan efisien, adil, dan terbuka bagi semua pihak terkait. Pertama, pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan terkait pariwisata dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi mengenai perencanaan, anggaran, dan keputusan strategis diungkapkan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Kedua, prinsip akuntabilitas diterapkan dalam segala aspek pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah secara rutin memberikan laporan mengenai penggunaan dana pariwisata, pencapaian target, dan dampak kebijakan kepada masyarakat. Mekanisme evaluasi dan audit eksternal juga diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat.

Ketiga, pemerintah Kabupaten Bima mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pariwisata. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Mekanisme umpan balik dan ruang partisipatif disediakan untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pengelolaan pariwisata.

Keempat, upaya transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bima juga tercermin dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan terbuka, forum diskusi, dan sesi konsultasi diadakan secara rutin untuk mendiskusikan arah kebijakan, perubahan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan industri pariwisata. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mencapai *Good Public Policy Governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima.

Keadilan dan Inklusivitas

Prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi manfaat pariwisata yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk memastikan bahwa peluang ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata dapat dinikmati oleh berbagai kelompok, termasuk yang berada di pedesaan dan kelompok masyarakat yang mungkin

rentan atau terpinggirkan.

Inklusivitas diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah berupaya untuk memastikan partisipasi aktif dari beragam kelompok masyarakat, termasuk suku, etnis, dan komunitas adat. Keberagaman budaya dan kearifan lokal diintegrasikan dalam pengelolaan pariwisata, memastikan bahwa destinasi pariwisata mencerminkan keunikan dan identitas setiap kelompok masyarakat di Kabupaten Bima. Kemudian melibatkan penyediaan akses dan fasilitas yang ramah untuk semua. Pemerintah lokal berupaya untuk menciptakan destinasi pariwisata yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas umum, transportasi, dan infrastruktur pariwisata dirancang dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua wisatawan. Dengan demikian, kebijakan pariwisata di Kabupaten Bima menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pengunjung.

Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik pariwisata. Pertama, Kabupaten Bima mengadopsi pendekatan pengelolaan destinasi pariwisata yang berfokus pada pelestarian alam dan lingkungan. Program konservasi dan restorasi ekosistem dilakukan untuk menjaga keberlanjutan flora dan fauna, memitigasi dampak perubahan iklim, dan memastikan bahwa pariwisata tidak merugikan lingkungan.

Kedua, perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima menekankan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan dan proyek pariwisata. Inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan diterapkan untuk meminimalkan jejak lingkungan dari aktivitas pariwisata. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, lembaga konservasi, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam seluruh rantai nilai pariwisata.

Ketiga, Kabupaten Bima berupaya untuk membangun kesadaran lingkungan di antara wisatawan dan komunitas lokal. Melalui program edukasi dan kampanye informasi, masyarakat dan pengunjung diajak untuk memahami pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Upaya ini termasuk penanaman pohon, penyuluhan tentang pengelolaan limbah, dan promosi perilaku ramah lingkungan selama kunjungan wisata.

Keempat, dalam perspektif ini, evaluasi berkelanjutan terhadap dampak lingkungan dilakukan secara periodik. Monitoring dan penilaian dampak lingkungan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pariwisata di Kabupaten Bima selalu sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian alam dan lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Bima berusaha mencapai keseimbangan antara pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi dengan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kemitraan dan Kolaborasi

Kemitraan dan kolaborasi dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima memainkan peran penting dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pertama, pemerintah Kabupaten Bima menjalin kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pariwisata. Melibatkan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat mengoptimalkan sumber daya dan membawa inovasi yang

diperlukan untuk memajukan sektor pariwisata.

Kedua, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya menjadi landasan dalam menciptakan kerangka kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Sinergi antarinstansi pemerintah memastikan bahwa kebijakan pariwisata Kabupaten Bima selaras dengan visi nasional dan regional, serta dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, Kabupaten Bima mendorong keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Melalui dialog terbuka dan partisipatif, pemerintah Kabupaten Bima menciptakan ruang bagi suara masyarakat untuk diakui dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, program pariwisata dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.

Keempat, Kabupaten Bima berusaha untuk membangun jaringan kemitraan lintas sektor dan lintas batas wilayah. Kolaborasi dengan kabupaten/kota tetangga, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian menjadi strategi untuk memperluas dampak pariwisata dan membangun pemahaman bersama tentang upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, kemitraan dan kolaborasi dalam *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima menjadi fondasi untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan harmonis dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terkait.

Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima adalah landasan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam pengelolaan pariwisata. Pertama, Kabupaten Bima mengadopsi pendekatan perencanaan yang holistik, yang melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Proses partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan pariwisata yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama, serta memiliki dukungan luas dari berbagai pihak.

Kedua, dalam perencanaan jangka panjang, Kabupaten Bima fokus pada diversifikasi produk pariwisata dan distribusi manfaat yang merata. Pemerintah berupaya mengembangkan berbagai destinasi, atraksi, dan aktivitas pariwisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang menciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif.

Ketiga, Kabupaten Bima merumuskan strategi perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika eksternal, seperti perubahan tren pasar dan tantangan lingkungan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi potensi risiko dalam pengelolaan pariwisata. Inovasi dan fleksibilitas dalam perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan relevansi destinasi pariwisata.

Keempat, perencanaan jangka panjang di Kabupaten Bima diarahkan pada pembangunan kapasitas dan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata. Investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan masyarakat lokal serta tenaga kerja pariwisata adalah upaya nyata untuk meningkatkan daya saing dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di

Kabupaten Bima menjadi fokus utama dalam pengelolaan pariwisata. Pertama, pemerintah Kabupaten Bima mengimplementasikan kebijakan yang mendorong partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata. Ini termasuk peningkatan peran dan pelibatan komunitas dalam pemilihan dan pengelolaan usaha pariwisata, memberikan kesempatan kepada pelaku lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor pariwisata.

Kedua, dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal, Kabupaten Bima menekankan diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor terkait dengan pariwisata. Ini melibatkan pengembangan industri kreatif, produksi lokal, dan kerajinan tradisional sebagai peluang ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah setempat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan ekonomi lokal.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal juga melibatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam manajemen dan kepemilikan sumber daya pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bima berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses yang adil dan merata terhadap keuntungan ekonomi dari sumber daya pariwisata, seperti pengembangan produk dan jasa lokal, serta pelibatan dalam inisiatif ekonomi berkelanjutan.

Keempat, Kabupaten Bima mendukung kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pembangunan keterampilan bagi masyarakat lokal agar dapat terlibat secara aktif dalam sektor pariwisata. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha pariwisata, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Pemberdayaan ekonomi lokal dalam perspektif Good Public Policy Governance menjadi instrumen penting untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan meningkatkan keberlanjutan sektor pariwisata Kabupaten Bima.

Edukasi dan Kesadaran

Edukasi dan kesadaran lokal menjadi aspek kritis dalam perspektif *Good Public Policy Governance* di Kabupaten Bima untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan keberlanjutan ekonomi dalam konteks pariwisata. Program edukasi yang menyeluruh dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari aktivitas pariwisata serta peran mereka dalam menjaga keberlanjutan.

Upaya meningkatkan edukasi dan kesadaran lokal juga melibatkan penguatan peran lembaga pendidikan formal dan informal dalam mendukung pembelajaran mengenai nilai-nilai keberlanjutan dan dampak pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan lembaga masyarakat, seperti kelompok adat dan organisasi non-pemerintah, menjadi kunci dalam membentuk pola pikir dan sikap positif terhadap praktik pariwisata yang berkelanjutan.

Kemudian dalam mendukung kesadaran lokal, pemerintah Kabupaten Bima memperkuat strategi komunikasi publik untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, aturan, dan manfaat pariwisata secara terbuka dan transparan. Kesadaran lokal menjadi landasan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan destinasi wisata secara positif. Edukasi dan kesadaran lokal, jika dielaborasi dengan baik, dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan keberlanjutan sektor pariwisata Kabupaten Bima.

Namun tantangan utama dalam mengimplementasikan edukasi dan kesadaran lokal

adalah rendahnya tingkat literasi dan akses informasi di beberapa wilayah Kabupaten Bima. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus menghadapi tantangan untuk menciptakan strategi edukasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk penggunaan media massa, pameran, dan program pendidikan komunitas.

Tantangan

Tantangan kebijakan di sektor pariwisata Kabupaten Bima, jika dilihat dari perspektif *Good Public Policy Governance*, mencerminkan dinamika yang perlu diperhatikan untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah deskripsi tentang tantangan tersebut:

Partisipasi Masyarakat yang Terbatas

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata masih terbatas. Tantangan ini dapat menciptakan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kebijakan.

Pengelolaan Lingkungan yang Belum Optimal

Pengelolaan lingkungan pariwisata yang belum optimal dapat mengancam keberlanjutan destinasi wisata. Tantangan ini mencakup pemantauan dan perlindungan terhadap ekosistem alam serta budaya lokal.

Kesimpulan

Dalam menghadapi dinamika sektor pariwisata Kabupaten Bima, perspektif *Good Public Policy Governance* menjadi kunci penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Tantangan, seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, kurangnya transparansi, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal, membutuhkan inovasi kebijakan yang memperkuat keterlibatan aktif masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Peluang inovasi kebijakan muncul dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme partisipatif yang lebih kuat, seperti forum diskusi dan konsultasi publik. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dicapai melalui pembuatan laporan publik dan platform informasi terbuka. Peluang terbesar terletak pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan membangun kerjasama yang kuat, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Public Policy Governance* dapat membantu menciptakan lingkungan kebijakan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keseluruhan, Kabupaten Bima memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan. Dengan menghadapi tantangan secara proaktif dan memanfaatkan peluang inovasi kebijakan, Kabupaten Bima dapat membangun fondasi yang kuat menuju tata kelola pariwisata yang baik, berdaya saing, dan berdampak

Akhyar, Syarif

positif pada masyarakat serta lingkungan.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, S., Negara, A., Tinggi, S., Sosial, I., Stisip, P., Negara, A., Tinggi, S., Sosial, I., & Stisip, P. (2018). Transit Wisata Alternatif. *Jurnal Sadar Wiasata*, 1(1), 1–20.
- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidyanto. (2015). Revitalization of traditional market based on good governance perspective (a study at Tumpang Market in Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(5), 758–762.
- Ayu Diyah Sri Widari Dewa. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkel. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(1), 1–11.
- Ayunda, R. (2021). Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 387. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765>
- Darmawan, E. (2020). Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. *2020Journal of Government - Jog*, 5(2), 106–125.
- Di, E., Sape, K., & Bima, K. (2023). *Menuju Kesejahteraan Pesisir : Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial*. 20(2).
- Dwi Urup Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Febrianti, E., Eprilianto, D. F., Wahyu, G., Publik, J. A., Negeri, U., & Daerah, P. (2023). *PENGEMBANGAN LOCAL HERITAGE DI KABUPATEN*. 07(01), 17–29.
- Harirah, Z., Azwar, W., & Isril, I. (2021). Melacak Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 70. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629>
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2019(July), 1. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>
- Hilman, Y. A. (2017). Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2(2), 150. <https://doi.org/10.24905/jip.v2i2.711>
- Imaduddin, R. (2017). *Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima* (Vol. 7).
- Jasman, J., & Arman, A. (2023). Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan Kabupaten Bima. *Mimbar Administrasi*, 20(1).
- Jumadi. (2020). Membangun Loyalitas Wisatawan Melalui Kebijakan Pariwisata Hijau dan Strategi Pemasaran Pariwisata Hijau. *Jurnal ALTASIA*, 2(2), 290–298.
- Jupir, M. M. (2013). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT). *J.Ind. Tour. Dev. Std*, 1(1), 1–10.
- Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 490–511.
- Munir, U. (2022). KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KERAKYATAN & IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN (Studi Pariwisata Di Pulau Lombok). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 305–317.
- Potensi, A., Tourism, S., Wisata, B., & Bengkayang, K. (2023). *PROGRAM MAGISTER IKIP PGRI PONTIANAK*.
- Ramdhon, A., Nugroho, H., & Sujito, A. (2020). Kota Festival Dan Skema Kebijakan Wisata Kota Di Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 478–492.

- <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43788>
- Rochayati, N., & Arifin, M. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pemandian Oi Lawu Di Tinjau Dari Unsur Biofisik Di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian ...*, 7(1), 18–27.
- Sahli, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 81–86.
- Subhan, A. (2017). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov*, 1(1), 86. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11801>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 85–96. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Yustiari, S. H. (2016). Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 169–174. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.6>

Copyright holder:

Akhyar, Syarif (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

